

NGO

DPW GN-PK Sultra Apresiasi Kinerja Pemda Buton

BK - SULTRA.NGO.WEB.ID

Jun 7, 2024 - 16:52

DPW GN-PK Sultra
Apresiasi Kinerja
Pemda Buton"



ARIMUSDI, S.Pd
KETUA DPW GNPK PROV. SULTRA

SULTRA - Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Nasional Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Sultra Apresiasi Kinerja Pemda Buton dibawah Kepemimpinan La Haruna.

Hal ini diungkapkan Arimusdi melihat gerakan cepat dari Pj Bupati yang baru sejak dilantik pada Selasa 28 Mei.

"gerak cepat pj ini perlu kita apresiasi, belum genap dua minggu dilantik namun beberapa terobosan eksekusi dilapangan terutama di bidang pertanian ia langsung selesaikan seperti panen padi dikapuntori, bagikan bantuan bibit dan lainnya," Kata Ketua GN-PK Sultra, Arimusdi. Jum'at (07/06/2024).

Arimusdi melihat gerakan cepat dari Pj Bupati Buton tersebut merupakan langkah-langkah cerdas untuk mengurangi inflasi di daerah.



GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) PROV. SULAWESI TENGGARA

MENGUCAPKAN

Selamat atas Petantikan



LA HARUNA, SP., M.Si
Pj Bupati Kab. Buton

"Semoga amanah ini menjadi jalan untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kab. Buton. Mari bersama-sama membangun Kab. Buton menuju arah yang lebih baik, dengan semangat persatuan, keadilan, dan kemajuan.!"



ARIMUSDI, S.Pd
KETUA DPW GNPK PROV. SULTRA

"kita bisa melihat pasca itu juga Pj mengikuti rakornas pengendalian inflasi, hal ini merupakan kewajiban pimpinan untuk memperhatikan daerahnya dan hal pasti kemudian itu akan berdampak pada kehidupan masyarakatnya," Ujar Ari

"Daerah akan berkembang jika Pejabatnya memberikan perhatian sampai di tingkat bawah, tentunya dengan program-program dan ini telah dilakukan oleh Pj Bupati Buton yang baru," tambahnya.

Ari juga berharap kepada Pj Bupati Buton agar kinerja yang telah dilakukan bisa menjadikan daerah lebih cepat berkembang.

Dalam mengawal pembangunan, Ari menyinggung agar Pj bisa selalu berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), terutama soal dana desa.

"ini sinkronisasinya pembangunan daerah dan Dana desa, kita juga tidak boleh melupakan anggaran disetiap desa, tentunya ini kita harus kawal bersama agar benar-benar pembangunan ini bisa merats dan tepat sasaran," jelasnya.

Bergerak dibidang pemberantasan Korupsi, Arimusdi berharap kepada APH agar selalu mengedepankan edukasi dalam pengawalan pengelolaan anggaran agar tidak terjadi tindak pidana Korupsi.

"yah kita harus ada kerjasama dalam artian mengawal pembangunan, edukasi terus masyarakat dan pemda khususnya agar dalam pengelolaan anggaran tidak terkesan terhambat pembangunan daerah karena hal-hal lain ataupun tekanan-tekanan, beri mereka (pemda dan desa) untuk berkreasi membangun daerah sesuai jalurnya dan agar tidak melanggar hukum," tutupnya.